BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang dengan sejuta kebutuhan hidup yang harus di penuhi. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat maka pekerjaan yang layak sangatlah penting bagi kesejahteraan rakyat.

Dahulu masyarakat Indonesia mayoritas sebagai pekerja/burug kasar yang pekerjaannya sangat tidak layak bagi penghidupan. Tapi dengan seiring perkembang zaman pekerja/buruh kasar terpaksa mencari penghidupan yang lebih layak dengan menjadi buruh pabrik. Mereka terpaksa menerima kondisi kerja yang ditetapkan secara sepihak oleh penyedia kerja. Kondisi kerja mereka juga tidak menjamin kesehatan dan keselamatan mereka.

Asal mula hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdiri atas beberapa fase dilihat semenjak abad 120 SM. Di Indonesia telah dikenal adanya system gotong royong. Sifat gotong royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan karena berintikan kebaikan, kebijakan, dan hikmah bagi semua orang.¹ Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula orang-orang maupun jenis pekerjaan salah satunya pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga konon sudah ada sejak zaman dahulu diperkirakan sejak zaman penjajahan dan masa kerajaan.

Secara manusiawi anak merupakan aset keluarga dan aset bangsa dalam suatu negara, oleh karena itu perlu dijaga, dirawat, dibimbing serta diarahkan dan dididik secara baik. Salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan hak anak adalah kebijakan wajib belajar selama 9 tahun. Kendala ekonomi keluarga merupakan

¹ R. Joni Bambang S *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm 53

salah satu factor menutup kesempatan anak memperoleh pendidikan dan terpaksa harus bekerja.

Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social.

Kehidupan anak secara yuridis telah diatur sebelumnya dalam Pasal 28 B atau 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak.

Fenomena pekerja anak, khususnya sektor informal yang bekerja karena faktor ekonomi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, akhir-akhir ini menunjukkan permasalahan tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Dalam arti bahwa anak-anak tersebut memiliki keresahan ganda karena selain mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan, juga dihadapkan pada perampasan hak yang sering muncul dalam bentuk-bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan. Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa dalam kenyataan banyak dijumpai pekerja anak, berasal dari kemelut kemiskinan, dalam arti orangtua mereka miskin dengan segala keterbatasan (pendidikan rendah, pendapatan minimum, gizi kurang, kesehatan rendah), sehingga timbul pandangan dari sebagian masyarakat bahwa pekerja anak bukanlah suatu permasalahan melainkan sebagai suatu hal yang positif.²

Menurut Hardius Usman dan Nakhrowi Djalal Nakhrowi, kemiskinan merupakan faktor utama pendorong utama bagi anak-anak untuk masuk ke pasar

² Sri Prastyowati, “Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan,” Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4, (Juni 2003)hlm 6.

tenaga kerja.³ Untuk mengatasi masalah ekonomi-ekonomi tersebut orang tua harus bekerja. Tidak hanya ayah, ibu yang bekerja, tidak jarang anak-anak sudah harus bekerja, demi membantu orang tua, dan mencari tambahan penghasilan untuk membiayai biaya hidup keluarga. Pada umumnya anak sebagai pembantu rumah tangga berada dalam posisi subordinat. Anak sebagai pekerja rumah tangga membuat dia tidak memiliki daya untuk berhadapan dengan majikannya. Isu sentral mengenai pekerja anak timbulnya konsekuensi negatif dari usia yang terlalu dini untuk bekerja, yang hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Untuk itu, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana menanggulangi masalah pekerja anak ini agar anak tidak terjerumus ke jurang permasalahan yang lebih dalam dan lebih kompleks. Pekerja anak harus diselamatkan segera dari bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan mereka⁴.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 diatur mengenai Pekerja Anak baik dari aspek pendefinisian sampai dengan persyaratan mempekerjaan anak.

Selanjutnya dalam Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang penanggulangan pekerja anak, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa, “Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak. Dan dalam ayat selanjutnya, bahwa penanggungan Pekerja Anak adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi

³ Hardius Usman dan Nakhrawi Djalal Nakhrawi, *Pekerja Anak di Indonesia, Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2004), hlm.149

⁴ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Ed. Rev., Cet. Ke-2, (Bandung: Nuansa, 2007), Hlm 83

Pekerja Anak berusia 15 tahun kebawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya”.⁵

Terkait dengan usia Pekerja Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum mempekerjakan anak, menghapus jenis pekerjaan yang membahayakan pekerja anak. Sebagaimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur tentang usia minimum pekerja anak adalah 15 tahun. Di lihat dari aspek perlindungan anak dan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia bukan saja terjadi pada pasaran kerja diranah publik namun juga terjadi pada pasaran kerja domestic yakni dalam ruang lingkup pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana hasil penelitian kolaborasi Dosen dan Mahasiswa tentang Kajian Sosio Yuridis Pekerja Rumah Tangga di Kota Gorontalo, terdapat 3 Pekerja Rumah Tangga di bawah umur.⁶ Di Gorontalo pekerja rumah tangga pada umumnya mulai dimunculkan di akibatkan jumlah kebutuhan hidup yang terus meningkat seiring berkembangnya zaman. Bukan hanya orang tua yang bekerja bahkan anak-anaknya pun di dorong untuk melakukan pekerjaan. Salah satunya bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Anak yang bekerja pun merupakan anak yang masih dalam usia sekolah.

Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang batas usia anak boleh bekerja dan dalam Pasal 68 pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah umur tetapi pasal ini belum diterapkan di gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian awal di kota gorontalo banyak terdapat pekerja anak dengan berbagai jenis pekerjaan baik formal maupun informal. Salah satu jenis pekerjaannya yaitu sebagai pekerja

⁵ Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah.

⁶ Mutia Cherawaty Thalib dan Nirwan Junus, 2015, Kajian Sosio Yuridis terhadap Eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo, Fakultas Hukum UNG

rumah tangga. Anak-anak yang sudah bekerja ini bahkan sudah tidak memiliki kebebasan untuk sekolah maupun bermain dikeranakan mereka harus bekerja. Mereka bekerja tanpa ada pengawasan secara langsung dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Bahkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak memiliki data konkrit tentang jumlah anak-anak dibawah umur yang bekerja. Mereka hanya memiliki suatu kegiatan tahunan dimana mereka melakukan penarikan anak-anak dibawah umur yang sudah bekerja dikembalikan ke satuan pendidikan dengan bantuan dari tiap-tiap kecamatan untuk mendata berapa anak yang sudah bekerja diusia sekolah. Akan tetapi tidak semua anak yang didata akan mendapatkan bantuan hanya beberapa saja sesuai anggaran pemerintah tahun 2015 ini ada 90 anak yang di kembalikan ke dunia pendidikan.⁷ Sampai sekarang belum ada data yang jelas tentang pekerja anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dinas social dan tenaga kerja hanya mendata anak-anak yang bekerja serabutan. Dapat dilihat di daerah kota timur ada 12 (dua belas) orang anak yang berumur 13-17 Tahun bekerja dibidang serabutan, penjual kue, dan buruh pasar. Dan di Kecamatan Kota Tengah ada 22 (dua puluh dua) orang anak berumur 13-17 Tahun yang bekerja dibidang serabutan, penjual kue, dan binatu. Sedangkan Kecamatan Kota Selatan ada 12 (dua belas) orang anak berumur 10-17 Tahun yang bekerja dibidang tukang parkir, pengemudi bentor, dan pemulung, sedangkan data PRT di bawah umur belum di temukan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja. Oleh karena ruang lingkup pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap pekerja anak tidak terfokus terhadap anak sebagai PRT. Namun secara empiris,eksistensi PRT dibawah umur ditemukan data lapangan domestic di Kota Gorontalo.

⁷ Yodi Panto Biludi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Wawancara tgl 13 januari

Berdasarkan penelitian ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

”Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Rumah Tangga Di Kota Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi pekerja anak sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo.
2. Bagaimanakah wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak sebagai PRT di Kota Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menginventarisasi eksistensi pekerja anak sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak sebagai PRT di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran secara teori bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya hukum tentang orang dan hukum keluarga. Serta terkait pula dengan hukum perikatan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pelaku-pelaku hubungan kerja dalam pasaran kerja domestik, baik Pekerja Rumah

Tangga (PRT), Pengguna Jasa PRT, dan Pemerintah selaku pengawas
Tenaga Kerja.